

**PENGARUH PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
Syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana oleh Ekonomi*

M. AMAR AKBAR
NIM : 1605906010030



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2020**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp.: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 12 Juli 2021

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Jenjang : STRATA 1

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara :

Nama : M. AMAR AKBAR

NIM : 1605906010030

Dengan judul : Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Darah Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Di Kabupaten Aceh Selatan

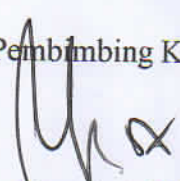
Yang Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Alisman, SE, M.Si
NIDN. 0113026404

Pembimbing Kedua

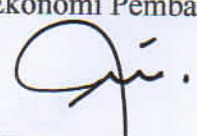

Yasrizal, M.Si
NIDN. 0005028802

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi


Prof. Dr. T. Zulham, SE., M.Si
NIP. 196002121989031003

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan


Dr. Helmi Noviar, SE., M.Si
NIDN.0105117402



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp.: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 12 Juli 2021

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Jenjang : STRATA 1

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara :

Nama : M. AMAR AKBAR

NIM : 1605906010030

Dengan judul : Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Darah Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Di Kabupaten Aceh Selatan

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada Tanggal 07 Juni 2021

Menyetujui Komisi Ujian

Tanda Tangan

- | | | |
|---------------|------------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Dr.Syahril , SE., M.Si | (.....) |
| 2. Sekretaris | : Alisman , SE., M.Si | (.....) |
| 3. Anggota | : Yasrizal ., M.Si | (.....) |
| 4. Anggota | : Yoyon Safrianto, SE., M.Si | (.....) |

Mengetahui :
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. Helmi Noviar, SE., M.Si
NIDN.0105117402

LEMBARAN PERYATAAN

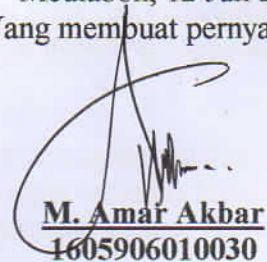
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. AMAR AKBAR
NIM : 1605906010030

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertai buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 12 Juli 202
Yang membuat pernyataan



M. Amar Akbar
1605906010030

ABSTRACT

This study aims to see the effect of regional income and expenditure on local revenue in South Aceh district. The data used is secondary data obtained from related agencies such as BPKD (Regional Financial Management Agency) South Aceh Regency. The data used in this research is from 2010 to 2019 which includes the Regional Revenue and Expenditure Budget Fund, and Regional Original Revenue which will be tested using simple linear analysis, t test, correlation analysis (r) and determinants (r²) using Software Statistical Product and Service Solutions (SPSS) ..

Based on this research, the final equation obtained is $Y = 369169249686,975 + 7,462 + e$ and then the tcount is $5,311 > t_{table} 1,883$ means that H_0 is rejected H_1 is accepted. So individually the influence of the Regional Revenue and Expenditure Budget Fund has a positive and significant effect on Regional Original Revenue in South Aceh Regency.

Keywords: Regional Revenue and Expenditure and Local Own Revenue.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Aceh Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 yang meliputi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah yang akan di uji menggunakan analisis linier sederhana, uji t, analisis korelasi (r) dan determinan (r^2) dengan menggunakan *Software Statistical Product and Service Solutions* (SPSS)..

Berdasarkan hasil penelitian ini persamaan akhir yang diperoleh yaitu $Y=369169249686,975+7,462+e$ dan selanjutnya diperoleh t_{hitung} sebesar $5,311 > t_{tabel} 1,883$ berarti H_0 di tolak H_1 diterima. Maka secara individual Pengaruh Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Selatan.

Kata Kunci : Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kuasanya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan proposal yang berjudul “Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Selatan” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini. Ucapan terima kasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda Lismadi dan Ibunda tercinta Diana Rosalia yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Alisman, SE. M.Si selaku pembimbing mata kuliah seminar proposal, yang begitu penulis sanjungkan dan banggakan yang telah menjadi orang tua kedua yang membimbing,

3. Bapak Yasrizal, M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, memberi arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. T. Zulham, SE. M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar di Meulaboh.
5. Dr. Helmi Noviar, SE. M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan proposal ini ada manfaatnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Meulaboh, 12 Maret 2021

Penulis

DAFRTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAAFTAR GRAFIS	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	8
2.1.1 Pengertian APBD.....	8
2.2 Anggaran Daerah	9
2.2.1 Dana Alokasi Umum(DAU).....	10
2.2.2 Dana Alokasi Khusus	12
2.3 Belanja Daerah.....	12
2.4 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia	15
2.5 Pendapatan Asli Daerah.....	17
2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	17
2.5.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.6 Hubungan Antar Variabel.....	18
2.7 Penelitian Terdahulu.....	24
2.8 Kerangka Pemikiran	25
2.9 Perumusan Hipotesis.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	27
3.2 Data Penelitian	27
3.2.1 Jenis Dan Sumber data	27
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	27

3.3 Model Analisis Data	27
3.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana	28
3.3.2 Koefisien Korelasi(R).....	28
3.3.3 Koefisien Determinasi(R^2)	29
3.4 Uji t	29
3.5 Pengujian Hipotesis	29
3.6 Definisi Operasional Variabel	30
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Gambaran Umum Penelitian.....	32
4.2. Analisis Deskriptif Stastistik Variabel Penelitian.....	32
4.2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	32
4.2.2. Pendapatan Asli Daerah.....	33
4.3. Uji Regresi Linear Sederhana	34
4.4. Uji Parsial (Uji t).....	35
4.5. Analisis Korelasi	36
4.6. Analisis Koefisien Determinasi	36
4.7. Pejabaran Hasil Hipotesis Penelitian	36
BAB 5. PENUTUP	38
5.1. Kesimpulan	38
5.2. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2018	4
2.1 Penelitian Terdahulu	26
4.1. Hasil Estimasi Regresi Linear Sederhana	33
4.2. Uji t	35
4.3. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinan	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	26

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
4.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Selatan	32
4.2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010-2019.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Penelitian	42
Lampiran 2 Surat Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya	43
Lampiran 3 Data Yang Input Dalam SPSS	44
Lampiran 4 Hasil Regresi	45
Lampiran 5 Nilai Distribusi t.....	48

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan perlu mendapat perhatian yang serius, baik dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat. Pembangunan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik sektor swasta maupun sektor pemerintah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan diperlukan ketersediaan dana yang besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya.

Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta. Salah satu dari sekian banyak reformasi hubungan pemerintah yang membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang lebih dikenal dengan “Otonomi Daerah”. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri usaha pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Dengan adanya otonomi daerah yang diberlakukan pemerintah daerah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah yang dianggap sangat penting.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah otonomi khusus yang dinyatakan dalam UU No.18 tahun 2011 disebutkan bahwa “*Hal mendasar dari Undang-Undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan mengaplikasikan Syariat Islam dan kehidupan bermasyarakat*”. Sebagai daerah otonomi Provinsi Aceh seharusnya berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai modal pembangunan daerah. Salah satu sumber penerimaan yang cukup berperan penting bagi berlangsungnya pembangunan adalah penerimaan dari pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak uku bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, pada prinsipnya semakin besar sumbangan pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari samapai 31 desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya, sehingga setiap belanja, program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD harus bertumpu pada hal tersebut.

Belanja daerah merupakan bagian utama dalam APBD yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Aceh Selatan dalam menjalankan pembangunannya memerlukan pendanaan, yang dalam pengelolaann keuangan daerah disebut pendapatan. Pendapatan tersebut baik bersumber dari Kabupaten Aceh Selatan dalam bentuk pendapatan asli daerah maupun pendapatan yang bersumber dari luar daerah berupa dana perimbangan ataupun lain-lain pendapatan yang sah digunakan untuk membiayai segala kebutuhan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikelompokkan dalam belanja daerah. Dalam membiayai semua kebutuhan pembangunan daerah, maka pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sudah tentu harus melihat kemampuan keuangan daerah dalam hal ini pendapatan daerah.

Pendapatan daerah memegang peran penting dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan pendapatan yang cukup maka pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Aceh Selatan akan berjalan dengan baik. Sehubungan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dana (Pendapatan Daerah) untuk membiayai tugas dan kewajiban yang makin bertambah. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penentu keberhasilan otonomi daerah, selain faktor aparat pemerintah daerah dan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi.

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah

(pemerintah daerah), disamping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian). Disisi lain semakin besar pendapatan yang dihasilkan dari pajak-pajak dan retribusi atau penerimaan yang bersumber dari masyarakat, maka akan mengakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian (terjadi kontraksi perekonomian).

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus meningkatkan Intesifikasi pajak diantaranya mendorong pengelola pajak dan retribusi daerah untuk secara insentif menanggih pajak, sehingga berturut-turut sejak tahun 2014 pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan terus mengalami peningkatan dan berdampak pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Pedapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010-2019

No	Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rupiah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rupiah
1	2010	85.810.784.411,00	17.585.914.619,26
2	2011	578.346.378.064,27	18.514.111.449,09
3	2012	665.189.402.241,70	33.502.663.375,45
4	2013	762.293.417.162,41	36.181.171.784,68
5	2014	1.019.826.803.705,00	75.721.277.199,30
6	2015	1.344.921.296.333,83	92.665.507.005,20
7	2016	1.561.749.995.486,66	125.989.165.878,83
8	2017	1.168.742.787.318,64	140.875.027.961,86
9	2018	1.410.405.975.816,00	151.961.434.830,97
10	2019	1.355.428.859.023,43	146.005.220.337,00

Sumber: BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Aceh Selatan 2020..

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, dari tahun 2014-2019.

Peningkatan ini tidak terlepas dari peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, hasil perusahaan milik daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan zakat. Perkembangan dari tahun ke tahun memberikan indikasi pada perspektif pendapatan Kabupaten Aceh Selatan yang cukup potensial dan prospektif. Jika dilihat dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.019.826.803.705,00 terus meningkat hingga pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.561.749.995.486,66. Sedangkan pada tahun 2017 kembali turun, naik kembali pada tahun 2018 yaitu Rp. 1.410.405.975.816,00,. Hal ini dipengaruhi karena meningkatnya belanja langsung yaitu belanja modal sebesar Rp 389.951.814.488,0 dan turun kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.355.428.859.023,43, karena belanja operasi lebih tinggi dari belanja modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka peneliti tertarik dan berkeinginan meneliti : **“Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh dana anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari di kampus dengan praktik yang telah diterapkan.

b. Bagi lingkungan akademik

Sebagai bahan referensi mahasiswa-mahasiswi di lingkup kampus agar dapat membantu proses perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bertujuan untuk pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua tinjauan pustaka, membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengertian APBD, anggaran daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja daerah, proses penyusunan anggaran di indonesia, pengertian pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah. . Selain itu terdapat juga penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk penelitian ini, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

Bagian ketiga metode penelitian, mengenai ruang lingkup penelitian, data penelitian, model analisis data, dan definisi operasional variabel.

Bagian keempat hasil dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum Kabupaten Aceh Selatan, Analisis statistik deskriptif variabel penelitian, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah, efektivitas pajak kendaraan bermotor, analisis laju pertumbuhan dan perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Bagian kelima simpulan dan saran yang berisi tentang kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang penulis diajukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.1.1 Pengertian APBD

Menurut Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan peraturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Djaenuri,2012).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah.

Halim (2012: h, 22) menyatakan bahwa suatu anggaran daerah termasuk APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut,

dan adanya biaya-beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.

- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
- d. Periode anggaran biasanya satu tahun

2.2 Anggaran Daerah

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Seluruh anggaran yang baik akan mencerminkan efektivitas kinerja pemerintah dimata publik, maka pemerintah harus benar-benar dapat membuat anggaran yang matang dan realistis untuk direalisasikan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo. 2009. h. 218).

Menurut Ahmad Yani (2009) anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dokumen anggaran daerah indonesia disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan pada sebuah aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum. Skla

dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD harus jelas siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab sehingga dapat dijadikan landasan untuk pertanggung jawaban baik antara eksekutif dan legeslatif, ataupun tanggung jawab didalam internal eksekutif sendiri.

Proses penyusunan anggaran publik memiliki karakteristik berbeda dengan penganggaran dalam bisnis. Karakteristik tersebut mencakup ketersediaan sumber daya, motif laba, barang publik, eksternalitas, penentuan harga pelayanan publik, dan perbedaan lain seperti intervensi pemerintah terhadap perekonomian melalui anggaran, kepemilikan atas organisasi dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatan keputusan.

Menurut Von Hagen (2005) penganggaran terbagi dalam empat tahapan yakni *executive planing*, *legeilative approval*, *executive implementation*, dan *expost accountability*. Di mana dan pada tahapan pertama terjadi interaksi antara executive dan legeslative dan politik anggaran paling mendominasi, dan pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agent.

2.2.1 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan komponen dari dana perimbangan yang ditransfer pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan menurut Ahmad Yani (2009. h. 22) mengemukakan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang besumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Adapun Dana perimbangan Menurut Deddi Nordiawan (2007:h.48) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kelompok dana perimbangan adalah sebagai berikut: Bagi hasil pajak seperti :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 21
- b. Bagi Hasil Bukan Pajak seperti : Provinsi sumber daya hutan, pemberian hak atas tanah negara, *Landrent*, penerimaan iuran eksplorasi
- c. Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- d. Dana Alokasi Khusus adalah dana perimbangan dalam pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari pemerintah provinsi.

Tujuan dari Dana Alokasi Umum menurut Ahmad Yani (2009. h.125) yaitu untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Dasar Hukum Dana Alokasi Umum:

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

2. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.

2.2.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Khusus (ADK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perse) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. Dana Alokasi Khusus (ADK) dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah pencapaian sarana prioritas nasional (Handayani 2012).

Menurut Nordiawan (2007, h. 158) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

2.3 Belanja Daerah

Menurut Halim (2007:44) belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa : Belanja daerah adalah semua kewajiban

daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung yang dimaksud terdiri dari terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya.

e. Bantuan sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

g. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Sedangkan, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.4 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Penerapan otonomi daerah tidak terlepas dari perubahan paradigma dan penganggaran daerah. Penganggaran berbasis kinerja mulai diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pada tahun anggaran 2003-2004. Anggaran kinerja mendorong partisipasi dari *stakeholder* sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik. Di mana legislatif diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam penyusunan dan penerapan anggaran sebagai produk hukum. Dalam kaitannya dengan pembahasan anggaran *executive* dan *legislative* membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui *bargaining* (dengan acuan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran) sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah.

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari satuan kerja yang ada di PEMDA, dokumen perencanaan anggaran dibuat oleh

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dokumen tersebut disusun dalam format usulan anggaran yang disebut Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Dokumen RASK kemudian diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya, di mana dalam format usulan tersebut harus benar-benar mengandung informasi yang relevan, tujuan yang pasti dari anggaran tersebut, sasaran yang ingin dituju melalui anggaran tersebut, dan besarnya anggaran yang diajukan yang kemudian akan diakomodasi dalam RAPBD yang akan di sampaikan kepada eksekutif.

Anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan oleh legeslatif menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktifitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legeslatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kerja eksekutif dalam hal pertanggung jawaban kepala daerah. Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangat lah penting. Karena bagaimanapun juga anggaran dengan jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemikiran yang strategis disetiap organisasi adalah proses di mana manajemen befikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang berorientasi kesasaran ke masa mendatang.

Proses penyusunan anggaran sektor publik di indonesia melalui empat tahapan:

a. Tahapan persiapan anggaran

Yang dilakukan pada tahap ini selalu melakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia.

b. Tahap ratifikasi

Tahap ratifikasi melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif diuntut tidak hanya memiliki managerial skill namun harus juga mempunyai *political skill*, *salesmen ship*, dan *coalition building* yang memadai.

c. Tahap implementasi pelaksanaan anggaran

Pada tahap ini yang paling penting bagi manajer keuangan yaitu pengetahuan sistem (informasi) akuntansi dan pengendalian manajemen.

d. Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika pada tahap ketiga dari tahapan proses penyusunan anggaran tercapai dengan baik.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Nurcholis (2007, h. 182), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah dari penerimaan pajak daerah, restribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.

Sedangkan menurut Ahmad Yani (2009, h. 172) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Undang-undang Nomor. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah atau PAD secara mendasar merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari

sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.2 Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 pasal 157 tentang pemerintah daerah, pendapatan asli daerah terdiri dari:

a. Hasil Pajak Dearah

Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sbagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaanya dapat dipaksakan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembagunan daerah sebagai konsekuensi dari diberlakunya otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku

surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

- a. Nama, Objek dan Subjek Pajak,
- b. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak,
- c. Wilayah Pemungutan,
- d. Masa Pajak,
- e. Penetapan Pajak,
- f. Tata cara penagihan dan pembayaran Pajak,
- g. Kedaluwarsa penagihan pajak,
- h. Sangsi Administrasi,
- i. Tanggal mulai berlakunya pajak.

Secara umum, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (TMBooks, 3013.h.7).

Menurut Suandy (2011. h. 229) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo. 2013.h. 12).

a. Hasil restribusi daerah

Hasil restribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Restribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal dan materil, tetapi ada alternatif jika tidak mau membayar, merupakan pemungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu restribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:5) bahwa restribusi yaitu : Pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menyatakan bahwa: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayara atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 108, objek

retribusi dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Jasa Umum
 2. Jasa Usaha
 3. Jasa Perizinan Tertentu.
- b. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelola, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik dalam berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di bidang tertentu.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang didapat dengan mengelola sumber daya daerah yang dimiliki. Bentuk dari pengelolaan kekayaan daerah ini dapat berupa Badan Usaha Milik Daerah yang mengeksplorasi dan mengelola sumber daya

daerah yang dimiliki. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2006, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup tiga hal yaitu jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup.

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN;
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masuk ke dalam kategori lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi;
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. Pendapatan dari pengembalian;
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

2.6. Hubungan Antar Variabel

2.6.1. Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu apabila APBD naik atau efektif maka PAD akan meningkat. Hal ini disebabkan penentuan APBD setiap tahun akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Ralisasi APBD yang merupakan representasi pengeluaran pemerintah daerah akan memberikan dampak terhadap akan kinerja perekonomian suatu daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Ahmad Yani 2009, h. 172)

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

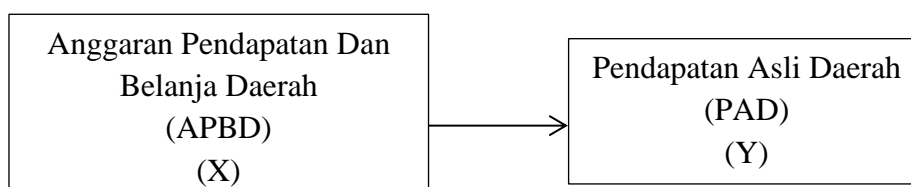
No	Penelitian	Judul	Metode Analisis	Kesimpulan
1	Geovani dan Endah, 2020	Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pendapatan Asli Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Berau	Data sekunder dengan metode dokumentasi	tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau secara rata-rata selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 adalah cukup efektif adalah ditolak. kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Berau secara rata-rata selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 adalah cukup baik juga ditolak
2	Yasin, Dkk. 2017	Analisis Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur	Analisis Regresi linear berganda	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan dengan t-statistik sebesar 2.779 (>1,96). Belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan dengan t-statistik 2.759 (>1,96). PAD terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten dan kota se-jawa Timur adalah tidak signifikan dengan t-statistik 1,741 (<1,69).
3	Deviani, 2016	Analisis Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat).	Analisis Regresi linear berganda	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa analisis belanja daerah yang diprosikan dalam ratio belanja terhadap PDRB, ratio belanja modal, dan ratio belanja dan menguji pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Dari pengujian yang dilakukan ratio belanja terhadap PDRB, dan ratio pertumbuhan belanja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4	W. Adawiya dan h, I. C. Kusuma, 2015	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi	Analisis kontribusi	Kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD dari tahun 2006 sampai dengan 2010 berkisar antara 11,20 % sampai dengan 16,19 %. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah Kota Sukabumi pada tahun 2006 sampai dengan 2010 menunjukkan hasil yang sangat efektif.
5	Harinoto, 2015	Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 2013	Analisis deskriptif kualitatif, dengan wawancara mendalam (<i>in-depth interview</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi APBD sebesar 9,117%. Artinya sumbangan yang diberikan sebesar 9,117 persen.
6	Dirgahayu Larengku m, dan Vecky, 2014	Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Produk Regional Bruto di Kabupaten Kepulauan Talaud	Analisis deskriptif dan analisis inferensia dengan model analisis sederhana.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber terbesar aspek penerimaan dalam APBD Kabupaten Kepulauan adalah realisasi belanja rutin sedangkan kontribusi PAD masih sangat kecil, realisasi belanja APBD setiap tahunnya masih didominasi oleh belanja rutin sedangkan realisasi untuk belanja modal atau belanja pembangunan masih minim.
7	Kusnandar dan Dodik, 2011	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal	data <i>cross section</i>	Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan luas wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh.

8	Sasana Hadi, 2010	<i>Flypaper Effect</i> Pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi di Indonesian	Analisis Regresi dengan kombinasi data <i>time series</i> dan <i>cross section</i> ,	Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
---	-------------------	--	--	--

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan uraian penelitian terdahulu yang sudah dibahas di atas untuk dijadikan sebagai landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Kerangka pemikiran ini menggambarkan pengaruh antara variabel independen yaitu APBD terhadap variabel dependen yaitu PAD.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.9 Pengujian Hipotesis

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Selatan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu 2010-2019

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk (*time series*) dari tahun 2010-2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Selatan, dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Selatan.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) di mana metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data sekunder, dilakukan melalui tinjauan dan kajian literatur, peraturan-peraturan, dokumen serta berbagai materi rujukan lain yang relevan dengan penelitian.

3.3 Model Analisis Data

Untuk menganalisis hubungan variabel dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana, uji asumsi klasik, koefisien kolerasi (R), koefisien determinasi (R_2) uji t. Untuk mempermudah dan mengurangi kesalahan secara

manual, maka pengolahan data dalam analisis ini menggunakan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Dengan penjelasan sebagai berikut :

3.3.1 Analisis Regresi Linear Sederhana

Yang dimaksud dengan persamaan regresi linear sederhana adalah merupakan model hubungan antara variabel tidak bebas (Y) dan variabel bebas (X), dengan bentuk umum persamaan garis linearnya seperti berikut menurut Supangat (2008, h. 334)

$$Y = a + bx + e \dots \dots \dots (1)$$

Kemudian persamaan (2) ditransformasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

$$PAD = a + b APBD +$$

$$e \dots \dots \dots (2) \text{ Di mana :}$$

APBD = Anggaran Pendapatan Asli Daerah (variabel terikat di ukur dalam rupiah)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (variabel bebas diukur dalam rupiah)

a = Konstanta

e = *error term*

3.3.2 Koefisien Kolerasi (R)

Yang dimaksud dengan koefisien kolerasi adalah tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan antara variabel *independen* (variabel bergantung Y dengan variabel bebas X) yang terbentuk dari model $Y = f(x)$ dikatakan pasti, jika disetiap nilai variabel bebas (X) terdapat suatu nilai variabel bergantung Y.

3.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini digunakan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) koefisien determinasi (R^2) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi.

Rumus koefisien determinasi menurut Hasan (2008, h. 236) :

$$Kp = r^2 \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Di mana :

Kp = Besarnya koefisien penentu (determinasi)

r^2 = Koefisien determinasi

3.4 Uji t

Uji t merupakan uji yang di gunakan untuk melihat signifikan dari pengaruh investasi publik terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Selatan. Dari tahun 2010-2019 yang secara parsial akan di uji dengan membandingkan nilai t (hitung) dengan t (tabel). Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independent secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependent. Suparto (2009, h. 204) dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \dots\dots\dots(4)$$

Di mana :

n = jumlah sampel

r = koefisiensi kolerasi

3.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. $H_0 : \beta = 0$, variabel Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diteliti tidak berpengaruh yang nyata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan.
- b. $H_a : \beta \neq 0$, variabel anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diteliti terdapat pengaruh yang nyata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan.

Kriteria uji hipotesis diterapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apabila $t_h \geq t_t$ maka H_0 ditolak H_1 diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang nyata antara anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Apabila $t_h \leq t_t$ maka H_0 diterima H_1 ditolak, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang nyata antara anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini didefinisikan dengan menggunakan analisis sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (X), adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu 2010- 2019 yang diukur dalam satuan rupiah.
- b. Pendapatan Asli Daerah (Y), adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu 2010-2019 yang diukur dalam satuan rupiah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956, tentang pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Aceh.

Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara disebelah Utara dan Kabupaten Aceh Barat Daya disebelah barat. Sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan disebelah timur berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Secara astronomis Kabupaten Aceh Selatan terletak antara 02°23' 24" - 03°44' 24" Lintang Utara dan antara 96°57' 36" - 97°56' 24" Bujur Timur, dengan ketinggian wilayah rata-rata 25 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari daratan rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan, dengan luas wilayah 4.005,10 km² yang membujur dari utara hingga selatan.

Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan berada di Kecamatan Tapaktuan. kecamatan yang letaknya paling jauh adalah Kecamatan Trumon Timur dengan jarak ke Kecamatan Tapaktuan sekitar 120 km. Kabupaten Aceh

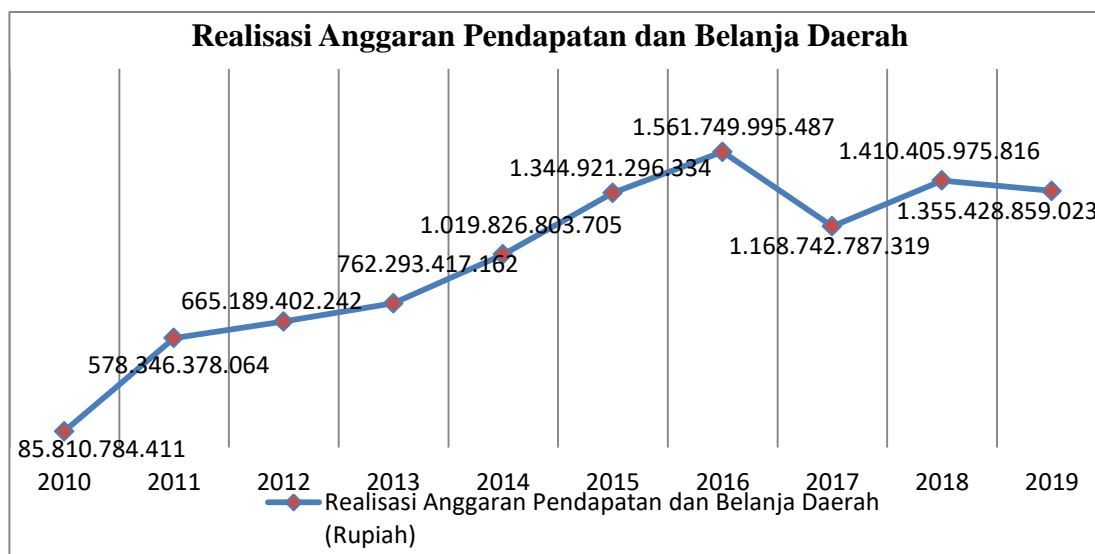
Selatan terdiri dari 18 kecamatan, dan luas wilayah menurut kecamatan. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2020)

4.2. Analisis Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

Analisis statistik variabel penelitian ini di gunakan untuk mengetahui pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu 2010-2019.

4.2.1 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perkembangan Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Selatan dapat di lihat pada grafik dibawah ini :



Sumber: BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Aceh Selatan 2020

Grafis 4.1.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan grafik 4.1 menunjukkan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Selatan Mengalami Fluktuasi dari tahun 2010 hingga sampai dengan tahun 2019. pada tahun 2010 merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Selatan

terendah yaitu sebesar Rp. 85.810.784.411 hal ini disebabkan karena belanja operasi lebih tinggi dari belanja modal. pada tahun 2016 merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Selatan tertinggi yaitu sebesar Rp. 1.561.749.995.486,66. Hal ini dipengaruhi karena meningkatnya belanja langsung yaitu belanja modal.

4.2.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan Penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :



Sumber: BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Aceh Selatan 2020

Grafis 4.2.
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan grafis 4.2 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, dari tahun 2010-2019. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah di Kabupaten Aceh Selatan terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 17.585.914.619 sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Kabupaten Aceh Selatan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.151.961.434.831 Peningkatan ini tidak terlepas dari peningkatan pajak daerah,

retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, hasil perusahaan milik daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan zakat. Perkembangan dari tahun ke tahun memberikan indikasi pada perspektif pendapatan Kabupaten Aceh Selatan yang cukup potensial dan prospektif.

4.3. Hasil Estimasi Regresi Linear Sederhana

Tabel 4.1
Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	369169249686,975	138763448228,094		2,660	0,029
	APBD	7,462	1,405	0,883	5,311	0,001

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS (2020)

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh persamaan regresi sederhana akhir estimasi sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 369169249686,975 + 7,462X + e$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 369169249686.975. Nilai konstanta ini menyatakan bahwa variabel bebas yakni Anggaran pendapatan dan belanja daerah sama dengan nol, maka pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar 369169249686.975 Juta.

2. Koefisien regresi Anggaran pendapatan dan belanja daerah

Nilai X dapat dilihat sebesar 7.462 di mana hal ini menjelaskan bahwa apabila variabel Anggaran pendapatan dan belanja daerah naik 1 persen, maka akan menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar 7.462 juta.

4.4. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.2
Uji Parsial (Uji t atau Individual)

Model	T	Sig,
(Constant)	2,660	0,029
APBD	5,311	0,001

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS (2020)

Tabel 4.2 di atas, dibuktikan Anggaran pendapatan dan belanja daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan. Tingkat kepercayaan (*Level of Confidence*) adalah 95%, pada taraf nyata (α) = 5 persen (0,05). Adapun nilai t tabel sebagai berikut :

$Dk = n - 1 = 10 - 1 = 9$. Jadi t tabel = 1,883

Maka keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut :

Variabel Anggaran pendapatan dan belanja daerah (X) diperoleh t_{hitung} sebesar 5,311 dan jika dibandingkan dengan t_{tabel} yaitu 1,883 maka nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($5,311 > 1,883$), selain itu nilai signifikansi variabel Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 0,001 nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata 0,05 ($0,001 < 0,05$). Berdasarkan kedua hal tersebut, maka H_1 diterima H_0 ditolak. Artinya secara parsial terdapat pengaruh Positif dan signifikan antara Anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga Anggaran pendapatan dan belanja daerah meningkat maka pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan akan mengalami peningkatan begitu pula sebaliknya.

4.5. Analisis Korelasi (R)

Tabel 4.3
Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	0,883 ^a	0,779	0,751	231477820213,67734	0,779	28,208

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS (2020)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dijelas bahwa nilai koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan variabel terikat pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,883 secara positif menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara Anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan keeratan hubungan sebesar 88,3 persen.

4.6. Analisis Determinan (R^2)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat hasil nilai koefisien determinasi sebesar 0,779 atau sebesar 77,9 persen artinya tingkat pendapatan asli daerah dapat di pengaruhi oleh Anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan sisanya 22,1 persen di pengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

4.7. Pejabaran Hasil Hipotesis Penelitian

Pengaruh pendapatan dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Anggaran pendapatan dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan hasil signifikansi pengujian yaitu $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja daerah meningkat maka pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan akan meningkat.

Hasil penelitian ini juga sama seperti yang dilakukan oleh oleh Verenika Geovani Endah Susanti tahun 2020 bahwa anggaran dan pendapatan belanja daerah berpengaruh positif terhadap PAD.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian masalah pengaruhnya PAD - APBD dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan interpretasi regresi linear sederhana, dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan memiliki hubungan.
- b. Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi dan determinasi dapat diketahui pendapatan dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan berpengaruh positif.
- c. Berdasarkan hasil uji t (parsial) yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pendapatan dan belanja daerah berpengaruh nyata dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, beberapa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan

a. Pemerintah

Pemerintah sebaiknya harus terus melakukan peningkatan Sistem dan prosedur penetapan perpajakan dan retribusi terus diupayakan penyempurnaannya, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan disiplin kerja, kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi.

Mengadakan reformasi dan restrukturisasi terhadap peraturan pendapatan. Penghitungan kembali sektor-sektor kekayaan daerah baik potensi maupun penetapan tarifnya

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel-variabel lain. Agar semakin mengetahui faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiya h, I. C. W dan Kusuma. 2015. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Akunida ISSN 2442-3033* Volume 1 Nomor 1, Juni
- Ahmad Yani. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andy Supangat. 2008. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Parameterik*. Jakarta: Kencana Perdana.
- Deviani. 2016. Analisis Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat). Universitas Negeri Padang.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Geovani Verenika dan Endah Susanti. 2020. Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pendapatan Asli Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Berau. *ECO-BUILD JOURNAL Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal STIE MUHAMMADIYAH TANJUNG REDEB*. Volume 4, No.1, April 2020. Hal. 54. PISSN: 2622-5336 EISSN: 2620-5416
- Halim, Abdul .2007. *Akuntansi Sektor Publik- Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul, dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4 Jakarta: Salemba Empat.
- Haritonoto. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013*. Vol.11 No.1
- Hasan, Iqbal. 2008. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*. PT Bumi Aksara.
- Husaini, Usman.2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusnandar dan Dodik Siswantoro. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Universitas Indonesia*

- Larengkum D, dkk. 2014. Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Edisi Ketiga Belas. Andi: Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis. 2007. *Perpajakan*. PT Global Media Edukasi, Yogyakarta.
- Sasana Hadi. 2010. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi di Indonesian. *Jurnal Eko-Regional*. Vol 5. No. 2, September.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- TMBooks. 2013. *Perpajakan : Esensi dan Aplikasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Von, Hagen. 2005. *Political Economy Of Fiscal Institutions*, Discussion paper 149, Governance and effeciency of economic System. GESY.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Belanja Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*.
- Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Lampiran III : Data Input Penelitian

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **dan** Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Selatan

No	Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rupiah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)
1	2010	85.810.784.411	17.585.914.619
2	2011	578.346.378.064	18.514.111.449
3	2012	665.189.402.242	33.502.663.375
4	2013	762.293.417.162	36.181.171.785
5	2014	1.019.826.803.705	75.721.277.199
6	2015	1.344.921.296.334	92.665.507.005
7	2016	1.561.749.995.487	125.989.165.879
8	2017	1.168.742.787.319	140.875.027.962
9	2018	1.410.405.975.816	151.961.434.831
10	2019	1.355.428.859.023	146.005.220.337

Lampiran IV

REGRESSION

```

/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X
/SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ADJPRED)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) .

```

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	995271569956.3000	464288751329.90880	10
APBD	83900149444.1000	54914726891.52600	10

Correlations

		PAD	APBD
Pearson Correlation	PAD	1.000	.883
	APBD	.883	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.000
	APBD	.000	.
N	PAD	10	10
	APBD	10	10

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	APBD ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: PAD

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	.883 ^a	.779	.751	231477820213.67734	.779	28.208

Model Summary^b

Model	Change Statistics		
	df1	df2	Sig. F Change
1	1	8	.001

a. Predictors: (Constant), APBD

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1511420551496369000 000000.000	1	1511420551496369000 000000.000	28.208	.001 ^b
Residual	4286558500070042000 00000.000	8	5358198125087553000 0000.000		
Total	1940076401503373000 000000.000	9			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), APBD

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	369169249686.975	138763448228.094		2.660	.029
APBD	7.462	1.405	.883	5.311	.001

Coefficients^a

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)					
APBD	.883	.883	.883	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PAD

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	APBD
1	1	1.850	1.000	.08	.08
	2	.150	3.506	.92	.92

a. Dependent Variable: PAD

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Predicted Value	500403601408.0000	1503176818688.0000	995271569956.3000	409799483690.41394
Std. Predicted Value	-1.208	1.239	.000	1.000
Standard Error of Predicted Value	74096304128.0000	120430551040.0000	102230322528.813	17170951110.327
Adjusted Predicted Value	482698526720.0000	1537607729152.0000	1008244224863.2214	413869497348.19090
Residual	-414592827392.0000	284238512128.0000	-.00002	218239381823.16226
Std. Residual	-1.791	1.228	.000	.943
Stud. Residual	-2.085	1.296	-.025	1.060
Deleted Residual	-561801134080.0000	316817080320.0000	-.92147	276641783710.58660
Stud. Deleted Residual	-2.886	1.364	-.103	1.260
Mahal. Distance	.022	1.536	.900	.559
Cook's Distance	.006	.772	.138	.232
Centered Leverage Value	.002	.171	.100	.062

Residuals Statistics^a

	N
Predicted Value	10
Std. Predicted Value	10
Standard Error of Predicted Value	10
Adjusted Predicted Value	10
Residual	10
Std. Residual	10
Stud. Residual	10
Deleted Residual	10
Stud. Deleted Residual	10
Mahal. Distance	10
Cook's Distance	10
Centered Leverage Value	10

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran V

Tabel Nilai t one-tailed dan two-tailed

2-Tailed	0,20	0,10	0,05	0,020	0,01	0,0010
1-Tailed	0,10	0,05	0,025	0,010	0,005	0,0005
1	3,078	6,241	12,706	31,821	63,657	636,619
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,599
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,924
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	5,610
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,869
6	1,440	1,943	2,447	2,143	3,707	5,959
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,480
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,781
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,587
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,437
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	4,318
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	4,221
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	4,140
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	4,073
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,965
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,922